



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RDPU PANJA PERGURUAN TINGGI KOMISI X DPR RI  
(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI - PEMUDA DAN  
OLAHRAGA - PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN  
NASIONAL)**

---

Tahun Sidang	: 2022 – 2023.
Masa Sidang ke-	: III (Tiga)
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat (RDP)
Dengan	: 1. Plt. Dirjen Diktiristek Kemendikbudristek RI 2. Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek RI 3. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
Hari/Tanggal	: Rabu, 8 Februari 2023
Pukul	: 10.00 – Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: <b>Dr. Dede Yusuf ME, ST, MI, Pol</b>
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI
Agenda acara	: 1. Kondisi, Pola Pembinaan, Tantangan, Peluang, dalam Pengelolaan Perguruan Tinggi. 2. Peran Pemerintah dalam Peningkatkan SDM, Keterjangkauan dan Pemerataan Akses, Mutu, Daya Saing, Relevansi, Inovasi, Riset, dan <i>Competitiveness</i> dalam Pendidikan Tinggi.
Hadir Komisi X DPR RI	: 20 orang dari 29 orang Anggota Panja Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI.
Hadir Narasumber	: 1. Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D., Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Dan Teknologi. 2. Dr. Ir. Kiki Yulianti, M.Sc., Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi 3. Mego Pinandito, Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan.

#### **I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 10.20 WIB oleh **Dr. Dede Yusuf ME, ST, MI, Pol**, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Plt. Dirjen Diktiristek, Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek RI, dan Kepala

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Panja Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI.

## II. KEPUTUSAN/KESIMPULAN

A. Panja Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI menyampaikan terima kasih kepada narasumber yang telah menyampaikan bahan paparan (terlampir), dengan beberapa poin utama antara lain:

### 1. Ditjen Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kemendikbudristek RI

- a. Secara total terdapat 4.523 PTN dan PTS dengan rincian 2.982 PTS dan 125 PTN dibawah Kemendikbudristek RI dengan jumlah total Prodi sebanyak 31.399 Prodi. Jumlah mahasiswa PTN sekitar 3.379.828 mahasiswa dan di PTS sekitar 4.495.453 mahasiswa. Sebanyak 85.612 dosen mengajar di PTN dan 183.713 dosen mengajar di PTS.
- b. Program MBKM diharapkan mampu mewujudkan pembelajaran yang fleksibel dan berkualitas sehingga tercipta budaya belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, diantaranya melalui program MSIB, Kampus Mengajar, Pertukaran Mahasiswa Merdeka, Wirausaha Merdeka, Praktisi Mengajar dan IISMA, yang diikuti oleh sekitar 117.050 Mahasiswa se-Indonesia.
- c. Proporsi anggaran untuk Perguruan Tinggi dilakukan secara kompetitif bagi PTN maupun PTS, diantaranya melalui berbagai program seperti *Matching Fund* (53% PTNBH, 30% PTS, 2% PTN Satker, 15% PTN BLU), Kompetisi Kampus Merdeka (58% dimenangkan oleh PTS), Pendanaan Penelitian (38% PTS, 26% PTN, dan 36% PTNBH), dan Pengabdian kepada Masyarakat (67% PTS, 21% PTN, dan 12% PTNBH). Total rekapitulasi bantuan pemerintah kepada PTN dan PTS TA 2022 pada Direktorat Belmawa sebesar 37% untuk PTN dan 63% untuk PTS.
- d. Kebijakan peningkatan dan pemerataan mutu layanan pendidikan maupun peningkatan jumlah perguruan tinggi kelas dunia, dilakukan antara lain dengan merasionalkan jumlah perguruan tinggi (*right sizing*). Sejak 2015 sampai 2022 terdapat 750 PTS yang digabung dengan jumlah SK penyatuan sebanyak 307 SK.
- e. Penyelenggaraan program bantuan bagi Prodi yang akan menjalani proses akreditasi oleh LAM, diberikan untuk Pembayaran Biaya Akreditasi sesuai kriteria dan anggaran yang tersedia bagi Prodi yang masa berlaku akreditasinya akan habis pada tahun 2022.
- f. Ditjen Diktiristek terus mendorong agar Perguruan Tinggi melakukan transformasi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi digital, seperti dalam proses pembelajaran di daerah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal). Bantuan secara kumulatif masing-masing Perguruan Tinggi, adalah dalam bentuk perangkat penunjang inovasi pembelajaran.

### 2. Ditjen Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek RI

- a. Peningkatan pendidikan vokasi saat ini ditunjukkan antara lain melalui pertumbuhan jumlah Perguruan Tinggi Vokasi (PTV), Universitas, Institut, Sekolah Tinggi dan Akademi (UNISTA), dan Perguruan Tinggi

Kementerian Lain (PTKL), yaitu sebanyak 2.139 Perguruan Tinggi dan Prodi Vokasi sebanyak 6.219 Prodi.

- b. Terdapat tiga tantangan dalam menghadapi era bonus demografi, yaitu tantangan produktivitas nasional, ketersediaan lapangan kerja, dan tingkat pengangguran, yang harus dihadapi dengan implementasi kongkrit dalam kolaborasi dengan dunia kerja, seperti magang/praktik kerja, penyusunan kurikulum bersama, praktisi mengajar, dan *update* kebutuhan dari dunia kerja.
- c. Upaya peningkatan mutu, relevansi, daya saing, dan perluasan akses PTV antara lain dilakukan melalui MBKM, sinkronisasi dan penguatan Tata Kelola Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga lain (melalui PP PTKL), transformasi pendidikan vokasi, dan membangun ekosistem inovasi berbasis kolaborasi *research* dan *development* antara Perguruan Tinggi dengan Sektor Industri.
- d. Program *Matching Fund* dan *Competitive Fund* yang dilakukan di PTV diarahkan untuk mencapai lompatan jauh ke depan (*leap frog*), sebagai intervensi kebijakan untuk mengakomodir dosen yang memiliki kepakaran, aspirasi, inovasi dan intervensi kebijakan untuk kelembagaan (Prodi atau Perguruan Tinggi) yang memiliki aspirasi, inovasi dan inisiatif.

### 3. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

- a. BRIN menyelenggarakan tugas di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran dan keantariksaan yang terintegrasi. BRIN berfungsi sebagai pendukung kebijakan pembangunan berbasis sains, penguatan ekosistem riset dan inovasi, dan sebagai *executing agency* aktivitas riset dan inovasi.
  - b. Strategi BRIN dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dilakukan melalui:
    - 1) sinkronisasi regulasi sebagai pendorong yang memadai untuk mendukung riset dan inovasi;
    - 2) *open platform* untuk peningkatan interaksi dan dinamika riset;
    - 3) mobilitas periset untuk peningkatan kapasitas dan mobilitas periset, fasilitasi riset dan inovasi;
    - 4) kolaborasi global dan *joint funding* dengan sumber dana dari dalam/luar negeri, baik pemerintah maupun swasta.
- B.** Terhadap penjelasan yang disampaikan para narasumber, Panja Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan:
1. Bahwa pengelolaan dan pelaksanaan Riset, Pendidikan Tinggi Vokasi dan Pendidikan Tinggi perlu memperhatikan beberapa hal, diantaranya:
    - a) perencanaan dan aktualisasi program riset, vokasi, dan pendidikan tinggi yang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
    - b) diperlukan Peta Jalan/*Grand Design* Pendidikan Tinggi, yang meliputi akses, mutu, relevansi dan tata kelola, dengan dukungan pemenuhan jumlah anggaran yang sesuai dan signifikan.

- c) evaluasi terhadap proporsionalitas kesesuaian jumlah perguruan tinggi dengan APK, jumlah dosen dengan mahasiswa, berbasis kondisi geografis di Indonesia.
  - d) mengembangkan Program Studi secara dinamis, yang dapat menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan zaman.
  - e) mengomunikasikan setiap program dan agenda Riset, Pendidikan Tinggi Vokasi dan Pendidikan Tinggi, dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga lain, yang memiliki kepentingan terhadap keberhasilan pendidikan.
  - f) mendukung adanya kolaborasi antara BRIN dan Perguruan Tinggi dalam melakukan dan pemanfaatan hasil riset.
2. Meminta Kemendikbudristek RI untuk melengkapi data mutakhir yang berkaitan dengan dosen, tenaga kependidikan, kepangkatan dosen, dan data perguruan tinggi yang ditetapkan sebagai *center of excellent*, untuk mendukung pengambilan keputusan/rekomendasi Panja Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI paling lambat 14 Februari 2023 pukul 16.00 WIB.
- C. Substansi dari bahan paparan yang disampaikan pada RDP hari ini akan menjadi rujukan dalam penyusunan rekomendasi Panitia Kerja Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI kepada Pemerintah.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 14.00 WIB.

KETUA RAPAT,



Dr. Dede Yusuf ME, ST. M.I.Pol. 